

BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab 2 ini memuat gambaran umum Kabupaten Gunungkidul, maksudnya untuk mendeskripsikan lokasi penelitian. Bab ini penting karena dalam penelitian kualitatif pengetahuan tentang subjek dan objek penelitian perlu dijelaskan dari studi kepustakaan berbagai sumber baik buku, jurnal, maupun website terkait Kabupaten Gunungkidul. Untuk maksud tersebut, pemaparan bab ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah Kabupaten Gunungkidul guna memberikan pengertian mengenai asal usul dan perkembangan Kabupaten Gunungkidul dari masa ke masa. Setelah itu, pemaparan bab ini dilanjutkan dengan deskripsi mengenai kondisi Kabupaten Gunungkidul dari segi geografis, kependudukan, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan yang merupakan faktor-faktor penting dalam pembangunan manusia khususnya pembangunan gender.

2.1 Sejarah Kabupaten Gunungkidul

Wilayah Kabupaten Gunungkidul telah dihuni sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan yang ditemukan oleh penelitian arkeologis. Peninggalan tersebut berupa situs-situs prasejarah pada zaman megalitikum, diantaranya Situs Sokoliman, Situs Gunung Bang, serta ditemukan temuan berupa artefak-artefak batu dan tulang rangka manusia di beberapa situs

lain yaitu Situs Goa Braholo, Situs Song Blendrong, Situs Song Agung, dan Situs Goa Benatar.

Berdasarkan penelitian arkeologis menunjukan bahwa pada masa Hindu-Budha banyak ditemukan peninggalan yang berupa bangunan candi, arca, dan prasasti di Kabupaten Gunungkidul. Peninggalan tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Gunungkidul, diantaranya Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, Kecamatan Panggang, dan Kecamatan Patuk. Meskipun sebagian besar dari peninggalan tersebut hanya berupa reruntuhan bahkan ada yang tersisa fondasi, namun masih dapat diidentifikasi sebagai peninggalan Hindu-Budha oleh penelitian arkeologi.

Beberapa bangunan candi yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebagai peninggalan Hindu-Budha yaitu Candi Risan yang terdapat di Desa Candirejo, Kecamatan Semin; Candi Plembutan dan Candi Papringan yang terdapat di Kecamatan Playen; Candi di Desa Ngawu dan Pulutan, Kecamatan Wonosari; Candi yang berupa fragmen kemuncak, fragmen puncak stupa dan reruntuhan batu candi di Kecamatan Paliyan; Situs Candi di Desa Pacarejo yang ditemukan arca Nandi, Ganesha, dan fragmen arca lainnya di Kecamatan Semanu; Situs Candi di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo; Situs Candi Desa Watusigar dan Kampung yang terdapat di Kecamatan Ngawen; dan Candi yang

ditemukan di Desa Gejahan, Kecamatan Ponjong, yang berupa fragmen batu candi dan yoni.³³

Selain itu bukti sejarah masa islam dapat ditemukan di Kabupaten Gunungkidul yang berupa batas yang memisahkan antara wilayah kekuasaan kesunanan Surakarta dengan Kesultanan Ngayogyakarta. Penentuan batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul disepakati oleh Sultan dan Mangkunegaran II pada tanggal 13 Mei 1831. Pada kesepakatan tersebut ditentukan bahwa semua daerah kecuali Ngawen sebagai daerah enclave Mangkunegaraan merupakan wilayah Kabupaten Gunungkidul di bawah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta.

Gunungkidul dicatat sebagai daerah administrasi sejak tahun 1831 seusai Perang Diponegoro, bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada tahun 1984, ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yaitu pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 2831 atau 15 Besar Je 1758 yang diungkap melalui penelitian, pengumpulan berbagai data dan fakta sejarah dari tokoh masyarakat, pakar, dan studi kepustakaan. Penetapan tersebut dikuatkan dengan adanya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No : 70/188.45/6/1985 tentang Penetapan hari, tanggal bulan dan tahun Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh bupati saat itu Drs KRT Sosro Hadiningrat tanggal 14 Juni 1985.³⁴

³³ Andi Purwanto. 2003. Pandangan Masyarakat Gunungkidul Terhadap Pelarian Majapahit Sebagai Leluhurnya (Kajian Atas Data Arkeologi dan Antropologi). *Jurnal Humaniora*. Vo.l XV, No. 2. hal 230-231.

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2018. *Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul*. BAPPEDA : Gunungkidul. Tersedia dari http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/Informasi_Pembangunan_Daerah_2018_pub.pdf. Hal 1.

Secara yuridis, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berkedudukan di Wonosari sebagai ibukota kabupaten sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan tersebut berdasarkan UU nomor 15 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 sebagaimana pada saat dipimpin oleh KRT Labaningrat.³⁵

Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh 28 periode kepemimpinan bupati terhitung sejak tahun 1831 hingga saat ini, namun hanya terdapat satu perempuan yang menjadi bupati Kabupaten Gunungkidul. Pada tabel dibawah dituliskan sejarah bupati Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 1
Bupati Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Nama
1.	1831 -	Mas Tumenggung Pontjodirjo
2.		Raden Tumenggung Prawirosentiko
3.		Raden Tumenggung Suryokusumo
4.		Raden Tumenggung Tjokrokusumo
5.		Raden Tumenggung Padmonegoro
6.	 - 1901	Raden Tumenggung Danuhadiningrat
7.	1901 - 1914	Raden Tumenggung Wiyodiningrat

³⁵ DPAD. 2018. *Sejarah Singkat Kabupaten Gunungkidul*. [Internet] [diunduh 2021 Januari 4] tersedia pada <http://dpad.jogjapro.go.id/article/news/view/sejarah-singkat-kabupaten-gunung-kidul-1486>

No.	Tahun	Nama
8.	1914 - 1930	KRT. Yudodiningrat
9.	1930 - 1935	KRT. Pringgodiningrat
10.	1935 - 1944	KRT. Djojodiningrat
11.	1944 - 1945	KRT. Mertodiningrat
12.	1945 - 1946	KRT. Dirjodiningrat
13.	1946 - 1947	KRT. Tirtodiningrat
14.	1947 - 1949	KRT. Suryadiningrat
15.	1949 - 1952	KRT. Labaningrat
16.	1952 - 1955	KRT. Brataningrat
17.	1955 - 1958	KRT. Wiraningrat
18.	1958 - 1959	Prawirosuwignyo
19.	1959 - 1974	KRT. Djojodiningrat, BA
20.	1974 - 1984	Ir. Raden Darmakum Darmokusumo
21.	1984 - 1989	Drs. KRT. Sosrodiningrat
22.	1989 - 1994	Ir. Soebekti Soenarto
23.	1994 - 2001	KRT. Harsodiningrat, BA
24.	2001 - 2005	Drs. KRT. Hardjohadinegoro (Drs. Yoetikno)
25.	2005 - 2010	Suharto, SH
26.	2010	Prof. Dr Ir Sumpeno Putro, MSc
27.	2010 - 2015	Hj Badingah S. Sos
28.	2016 - 2021	Hj Badingah S. Sos

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul,
diakses pada 13 Januari 2021

Perkembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak berlangsung sekaligus namun melewati beberapa tahap. Pada tahun 1995, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 13 Kecamatan yang kemudian berkembang menjadi 15 Kecamatan pada tahun 1996. Tambahan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Saptosari yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Gedangsari yang merupakan pemecahan Kecamatan Patuk. Sejak tahun 2001, Kabupaten Gunungkidul berkembang menjadi 18 kecamatan dengan tambahan Purwosari (pecahan Kecamatan Panggang), Kecamatan Tanjungsari (pecahan Kecamatan Tepus) dan Kecamatan GiriSubo (pecahan Kecamatan Rongkop).³⁶

2.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Gunung Kidul berada pada 110° 21'sampai 110° 50' Bujur Timur 7° Sampai 8° 09' Lintang Selatan.³⁷

Kabupaten Gunung Kidul terletak di sekitar equator. Hal ini menyebabkan daerah ini memiliki iklim tropis. Suhu harian kurang lebih sekitar 27, 7° C,

³⁶Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Gambaran Gunungkidul*. [Internet] [diunduh 2021 Januari 4] tersedia pada <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/gambaran-gunungkidul/>

³⁷ *Ibid.*

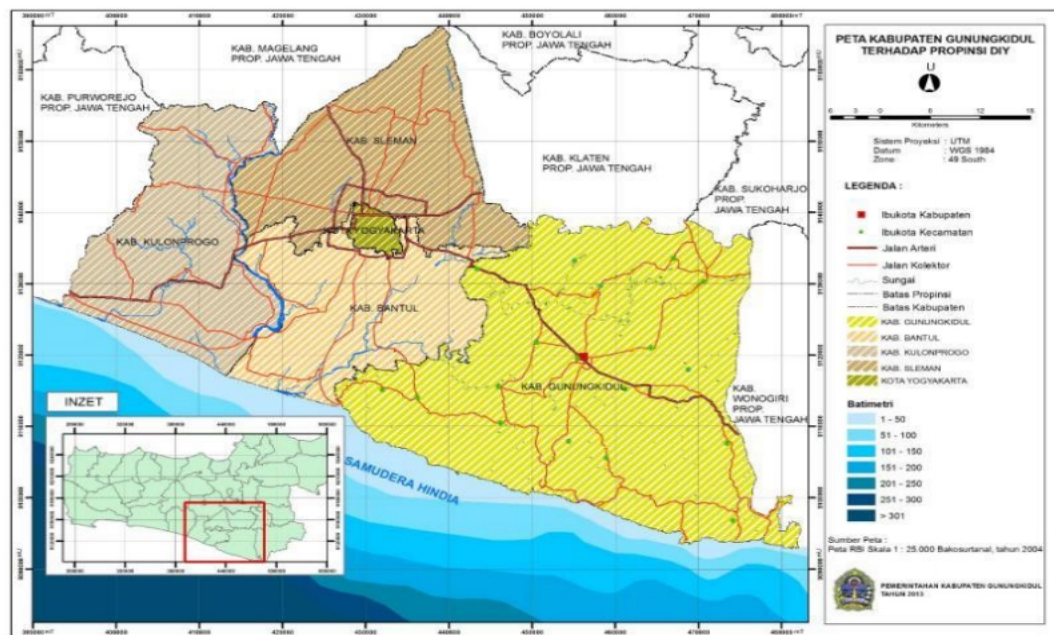
dengan rentang suhu terendah yaitu 23, 2° dan suhu tertinggi yaitu 32, 4°. Kabupaten Gunungkidul memiliki curah hujan yang agak basah dengan tiga bulan kering dan tujuh bulan basah. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul bagian utara memiliki wilayah curah hujan yang tinggi apabila dibanding wilayah tengah dan selatan. Selain itu, wilayah Kabupaten Gunung Kidul bagian selatan mempunyai awal hujan paling akhir. Kelembaban nisbi di daerah ini berkisar pada 80%-85%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi biasa terjadi pada bulan Januari hingga bulan Maret dan kelembaban terendah terjadi pada bulan September.³⁸

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan diantaranya, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin. Dari 18 kecamatan tersebut terdapat 144 desa yang berada di Kabupaten Gunungkidul.

³⁸ Winarni, Op. Cit., Hal 12.

Gambar 2. 1

Peta Kabupaten Gunungkidul Terhadap Provinsi D.I Yogyakarta



Sumber : DPMPT Kabupaten Gunungkidul, diakses pada 10 Januari 2021

Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan lima kabupaten lain, provinsi lain, dan samudra hindia. Berikut batas wilayah Kabupaten Gunungkidul :

- Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah).
- Sebelah barat : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Berdasarkan tipologi, Kabupaten Gunung Kidul terbagi menjadi tiga zona yang berpengaruh terhadap arah pengembangan yang berbeda dari setiap zona, diantaranya adalah :

1. Zona Batur Agung atau Zona Utara

Zona utara terdiri dari daerah Kecamatan Patuk, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin, dan Ponjong Utara. Zona ini memiliki ketinggian antara 200-700 mdpal. Arah pengembangan zona utara yaitu bidang pertanian serta menjadi daerah konservasi sumber daya air karena memiliki bentang alam yang berbukit bukit serta sungai di atas permukaan tanah.

2. Zona Ledoksari atau Zona Tengah

Zona tengah meliputi Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan Utara, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu Utara, dan Ponjong Selatan. Zona ini memiliki ketinggian sekitar 150-200 mdpal. Pengembangan di zona tengah diarahkan untuk pertanian, eko wisata,

industri rumah tangga dan manufaktur, teman hutan rakyat, serta wisata pra-sejarah.

3. Zona Karst Gunungsewu atau Zona Selatan

Zona selatan meliputi wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan Selatan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu Selatan, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.dengan ketinggian 100-300 mdpal. Arah pengembangan zona selatan adalah budidaya pertanian lahan kering, perikanan laut, ekowisata karst, serta akomodasi wisata diantaranya perhotelan dan restoran dengan melihat keadaan wilayahnya yang memiliki bukit kapur, telaga, dan banyak sungai bawah tanah serta memiliki deretan pantai.

2.3 Kondisi Sosial dan Budaya

2.3.1 Kondisi Kependudukan Kabupaten Gunungkidul

Kependudukan merupakan kunci bagi pembangunan daerah Apabila daerah memiliki penduduk yang berkualitas maka hal tersebut dapat menjadi aset yang dapat membangun daerah dari berbagai bidang. Namun apabila penduduk tersebut berjumlah besar namun kualitasnya rendah justru dapat menjadi beban bagi daerah sebagaimana dapat menghambat pembangunan daerah.

Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data BPS pada tahun 2017 semester 2 :

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Total (%)
Wonosari	42.680	85.272	85.272
Nglipar	16.748	16.797	33.545
Playen	29.653	30.100	59.753
Patuk	16.807	17.061	33.868
Paliyan	16.327	16.561	32.888
Panggang	14.565	14.910	29.475
Tepus	18.230	18.449	36.679
Semanu	29.180	28.954	58.134
Karangmojo	28.253	28.320	56.573
Ponjong	28.196	28.245	56.441
Rongkop	15.194	15.245	30.439
Semin	27.894	27.571	55.465
Ngawen	17.332	17.363	34.695
Gedangsari	19.566	19.369	38.935
Saptosari	19.276	19.010	38.286
Girisubo	12.845	13.081	25.926
Tanjungsari	14.267	14.521	28.788
Purwosari	10.228	10.634	20.862
Jumlah	377.241	378.783	756.024

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, diakses pada 28 Desember 2020

Berdasarkan tabel diatas, data pada tahun 2017 menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki laki. Total jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 378.783 (51,29%) dan jumlah penduduk laki-laki adalah 377.241 (48,71%) dari semua kecamatan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018,

berdasarkan estimasi hasil SP2010 sebanyak 736 210 jiwa. Dengan laki-laki sebanyak 355 282 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 380 928 jiwa.

Jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki dapat menjadi potensi tersendiri apabila diberdayakan dengan baik, namun sebaliknya apabila tidak diberdayakan atau bahkan di abaikan dapat menjadi beban bagi daerah Kabupaten Gunungkidul.

2.3.2 Kondisi Pendidikan

Pendidikan layak didapatkan oleh semua orang tanpa melihat gender. Setiap warga negara tak terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik masyarakat yang tinggal di daerah kota maupun desa bahkan yang terpencil sekalipun, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa melihat ras.

Pendidikan berperan penting dalam perkembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu tujuan negara yang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu dalam pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.³⁹ Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk pembentukan dan perkembangan

³⁹ tersedia pada <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf> [diakses 13/1/2021]

individu yang unggul secara emosional (EQ), spiritual (SQ), dan intelektual (IQ) untuk kemajuan bangsa dan negara.

Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dalam peningkatan kualitas pendidikan sangat beragam diantaranya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS); Rata-rata Lama Sekolah; Tingkat Partisipasi Sekolah / Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; dan Angka Putus Sekolah.

Tabel 2. 3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2017

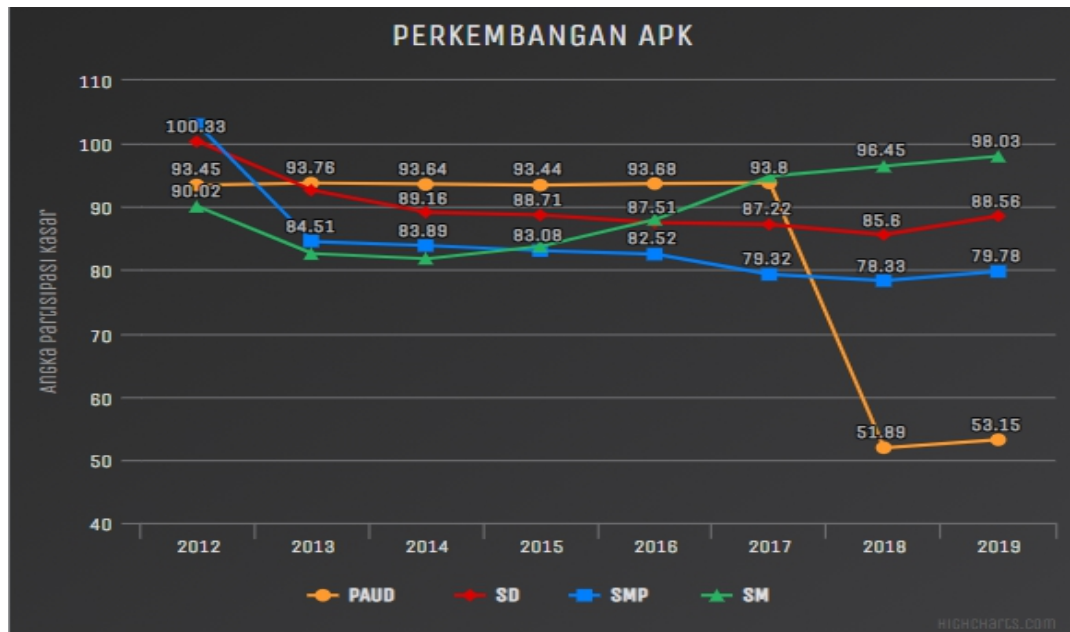
No	Tahun	7-12 Tahun			13-15 Tahun			16-18 Tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	2016	44.50	43.82	88.32	102.44	101.32	101.89	63.39	60.77	62.11
2.	2017	91.84	91.42	91.64						
3.	2018	108	108	108	143	147	145	76	72	74

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, diakses pada 13/1/2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika pada tahun 2016 dan tahun 2017 laki-laki memiliki APS lebih tinggi dibandingkan perempuan yang terjadi di hampir semua tingkatan usia. Pada tahun 2018 ada perubahan, yakni pada usia 7-12 tahun laki-laki dan perempuan APS sama, untuk usia 13-15 tahun

(jenjang SLTP) perempuan lebih tinggi, sementara usia 16-18 Tahun (jenjang SLTA) tidak berubah bahwa APS laki-laki lebih tinggi.

Gambar 2.2
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012-2019

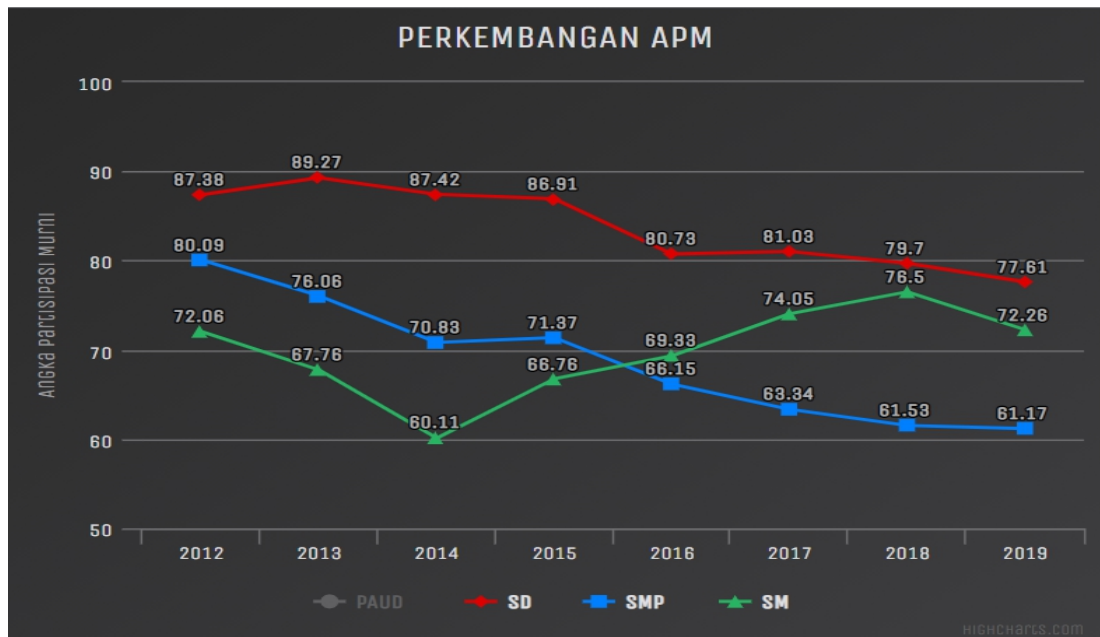


Sumber : Kemdikbud, diakses pada 13/1/2021

Gambar 2. 3

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2012-2019



Sumber : Kemdikbud, diakses pada 13 Januari 2021

2.3.3 Kondisi Perekonomian

Setiap wilayah di Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang berpengaruh pada sektor ekonomi yang dihasilkan dan bidang ketenagakerjaan pada masing masing wilayah. Beberapa sektor diantaranya : pertanian, peternakan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Perempuan memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah dilihat dari ketenagakerjaan perempuan.

Tabel 2. 4

**Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2019**

Kelompok Umur	Penduduk 15 tahun keatas Yang Bekerja Menurut Golongan Umur (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
15-24	18 339	18 439	17 819	10 041	7 653	12 794	28 380	26 092	30 613
25-29	21 613	21 785	23 770	12 007	12 301	9 780	33 620	34 086	33 550
30-34	22 697	22 707	13 662	15 169	11 721	11 707	37 866	34 428	25 369
35-44	46 587	46 120	44 584	40 876	41 930	31 042	87 463	88 050	75 626
45-54	49 153	50 170	52 156	49 461	48 093	49 421	98 614	98 263	101 577
55-59	24 330	23 970	23 580	24 856	25 389	27 418	49 186	49 359	50 998
60-64	22 424	20 598	23 552	21 789	20 714	22 320	44 213	41 312	45 872
65+	33 839	33 554	31 509	26 383	32 094	27 277	60 222	65 648	58 786
Jumlah	238 982	237 343	230 632	200 582	199 895	191 759	439 564	437 238	422 391

Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 14/1/2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2017 adalah 191. 759 atau setara dengan 45, 39 %, sedangkan jumlah pekerja laki-laki adalah 230. 632 atau setara dengan 54, 60 %. Pada tahun 2018, presentase perempuan yang bekerja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45, 71 % dan presentase laki-laki yang bekerja sebesar 54,28 %. Meskipun presentase dari jumlah perempuan dan laki-

laki yang bekerja masih tergolong fluktuatif dikarenakan pada tahun 2019 presentase perempuan yang bekerja mengalami penurunan menjadi 45, 63% dan presentase laki-laki yang bekerja sebesar 54, 36%, tetapi secara jumlah perempuan bekerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah pekerja tersebut tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga laki-laki. Sebagaimana diketahui total jumlah yang penduduk yang bekerja pada tahun 2017 adalah 422. 391, pada tahun 2018 yaitu sebesar 437. 238, dan pada tahun 2019 sejumlah 439 564

2.3.4 Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam pengintegrasian pengarusutamaan gender. Kondisi kesehatan di masyarakat Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pengarusutamaan gender dapat dilihat dari berbagai segi tidak hanya berkaitan dengan perempuan tetapi juga, anak, balita, dan laki-laki. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul dilihat dari presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam 6 tahun terakhir.

Tabel 2. 5
Presentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2014-2019

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	41,84

No.	Tahun	Jumlah
2	2015	38,17
3	2016	35,38
4	2017	31,28
5	2018	34,16
6	2019	35,76

Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 7/2/2021

Berdasarkan Tabel 2.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa keluhan penduduk pada tahun 2014 hingga 2019 secara keseluruhan cenderung menurun meskipun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2017. Dengan semakin menurunnya keluhan kesehatan, hal ini berarti kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul semakin membaik.

Selain itu, salah satu indikator kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup atau disebut juga umur harapan hidup. Angka harapan hidup atau yang selanjutnya disebut AHH adalah rata-rata perkiraan umur seseorang yang diharapkan dapat hidup. Angka Harapan Hidup dapat menjadi alat untuk mengevaluasi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dalam hal kesehatan. Apabila suatu daerah memiliki AHH yang rendah maka artinya daerah tersebut harus diikuti dengan meningkatnya program pembangunan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas program dan target program. Ukuran yang sering digunakan adalah AHH seseorang pada saat lahir mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga ketika membahas

mengenai AHH, yang dimaksud adalah rata rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.⁴⁰

Tabel 2. 6

**Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam 10 Tahun Terakhir
(Tahun 2010-2020)**

No	Tahun	Jumlah
1.	2010	73,3
2.	2011	73,3
3.	2012	73,3
4.	2013	73,3
5.	2014	73,3
6.	2015	73,6
7.	2016	73,7
8.	2017	73,8
9.	2018	73,9
10.	2019	74,0
11.	2020	74,1

Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 7/2/2021

Komponen lainnya yang penting diperhatikan dalam melihat gambaran kesehatan adalah kondisi ibu hamil di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah ibu hamil dan kelahiran merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi besarnya populasi penduduk di Kabupaten Gunungkidul sehingga kondisi kesehatan memiliki pengaruh yang sangat besar.

⁴⁰ Diah Ikawati. 2010. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia. Bada Pusat Statistik : Jakarta. Hal 15.

Tabel 2. 7
Jumlah Kematian Ibu pada Masa Kehamilan, Melahirkan, dan Nifas di
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Kematian Ibu
1.	2015	7
2.	2016	5
3.	2017	12
4.	2018	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, diakses pada 8/2/2021

Data diatas memperlihatkan bahwasanya jumlah kematian ibu dari tahun 2015 hingga 2018 masih tergolong fluktuatif. Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan presentase cakupan ibu hamil yang berkunjung ke Sarana Pelayanan Kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 presentase ibu hamil yang mengunjungi sarana kesehatan K1 mencapai 100% sedangkan yang mengunjungi K4 sebesar 89,3%. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu presentase yang mengunjungi K1 sebesar 100% dan K4 sebesar 86%. Kemudian, pada tahun 2018, angka tersebut menurun lagi menjadi 99,77% untuk presentase ibu yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan K1 dan sebesar 83, 63% untuk presentase ibu hamil yang mengunjungi K4.

Secara umum, tingginya angka kematian kehamilan di bawah umur yang dapat beresiko lebih besar, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi dan kehamilan, kurangnya fasilitas transportasi dan fasilitas publik lainnya, jarak kehamilan yang terlalu dekat, tidak ada pemeriksaan pada waktu hamil dan perawatan pada masa nifas, dan kurangnya fasilitas kesehatan

serta tenaga medis. Adapun penyebab kematian ibu cukup beragam, diantaranya adalah eklamsi, infeksi, abortus, emboli obstetri, komplikasi pada masa purpureum, pendarahan, dan lainnya. Dari sekian penyebab dan jumlah kematian ibu diatas merupakan resiko yang hanya dialami perempuan.

Kesehatan ibu hamil dan melahirkan memerlukan perlakuan tersendiri. Selama hamil, ibu memerlukan zat gizi yang lebih banyak karena tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi ibu tetapi juga janin. Maka dari itu, ibu hamil memerlukan tablet zat gizi (Fe). Data di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat sebanyak 7.228 yang mendapat Fe1 dan 6.796 ibu yang mendapat Fe3 dari jumlah total sebanyak 8.463 ibu hamil. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 8.460 ibu mendapat Fe1 dan 7.597 ibu yang mendapat Fe3 dari jumlah total 8.965 ibu hamil. Kemudian jumlah menurun pada tahun 2018, sebanyak 7.752 ibu mendapatkan tablet Fe1 dan sebanyak 6.870 ibu mendapat tablet Fe3 dari jumlah total ibu hamil yang masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 8.965 orang.⁴¹

2.4 Pembangunan Gender

Pembangunan manusia ditujukan untuk semua komponen masyarakat dengan tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, untuk memastikan adanya kesetaraan dalam pemberdayaan dan

⁴¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul. 2019. *Analisis Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019*. Gunungkidul. Hal 35-50.

pembangunan manusia maka muncul adanya indikator untuk mengukur pembangunan manusia dari segi gender.

Pembangunan gender di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indikator yang biasa digunakan dalam menganalisis capaian pembangunan suatu daerah bahkan negara terutama terkait dengan gender dan sumber daya manusia. Kedua indikator tersebut sebagai ukuran yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sehingga mempermudah analisis yang dilakukan secara parsial.

IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dan laki-laki melalui mengukur ketimpangan gender pada berbagai bidang seperti, bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.⁴² IDG merupakan indikator yang merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam persamaan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang disusun oleh UNDP.

Tabel 2. 8
Metodologi Penghitungan IDG

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen laki laki dan perempuan.	

⁴² Tersedia pada <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2> [diakses 2021 Februari 21]

Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan.	IDG
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 21/2/2021

Tabel diatas menunjukan bahwa metodologi dalam menentukan IDG dipengaruhi dari tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dari ketiga dimensi tersebut terdapat indikator yang digunakan untuk menghitung IDG. Metodologi penghitungan IDG tersebut diantaranya :

1. Keterwakilan di Parlemen

$$EDEP_{par} = \left(\frac{Pr}{Xp} + \frac{Pm}{Xm} \right) \times 100^{-1}$$

$$I_{par} = \{ EDEP_{par} \} / 50$$

Keterangan :

Pf : proporsi penduduk perempuan

Pm : proporsi penduduk laki-laki

Xf : proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

Xm : proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

2. Pengambilan Keputusan

$$\text{EDEP}_{dm} = \left(\frac{Pr}{Yp} + \frac{Pm}{Ym} \right) \times 100^{-1}$$

$$\text{Idm} = \left\{ \text{EDEP}_{dm} \right\} / 50$$

Keterangan :

Pf : proporsi penduduk perempuan

Pm : proporsi penduduk laki-laki

Yf : proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Ym : proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

3. Distribusi Pendapatan

$$\text{EDEP}_{(inc-dis)} = \left(\frac{Pf}{Zf} + \frac{Pm}{Zm} \right)^{-1}$$

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(\text{EDEP}_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)})}{732,72 - 300}$$

Keterangan :

Pf : proporsi penduduk perempuan

Pm : proporsi penduduk laki-laki

Zf : proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Zm : proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

Setelah ketiga dimensi atau komponen tersebut diketahui, maka langkah terakhir dalam penghitungan IDG adalah dengan menggunakan metodologi dibawah ini.

$$\text{IDG} = \frac{I_{par} + I_{dm} + I_{inc-des}}{3}$$

Tabel 2. 9
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2018

No.	Tahun	IDG
1.	2010	59,36
2.	2011	62,22
3.	2012	64, 58
4.	2013	66,01
5.	2014	68,27
6.	2015	64,48
7.	2016	-
8.	2017	68,70
9.	2018	67,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, diakses pada 8/1/2021

Tabel diatas menunjukan capaian IDG di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat. Poin terendah dari tahun 2010 sampai tahun 2018 adalah tahun 2010 yaitu sebesar 59,36 dan poin tertinggi dicapai pada tahun 2017 yaitu 68,70 dan tahun 2014 yaitu 68,27. Meskipun IDG Kabupaten Gunungkidul tersebut masih berada dibawah rata-rata pencapaian IDG Nasional yaitu sebesar 70,5, namun IDG di Kabupaten Gunungkidul berada di atas 50% di setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi gambaran kesetaraan gender di Kabupaten Gunungkidul dari segi ekonomi, parlemen, dan pengambilan keputusan.

Tidak hanya IDG yang menjadi ukuran kesetaraan gender yang diperkenalkan UNDP tetapi juga Indeks Pembangunan Gender atau IPG. IPG merupakan indikator yang menunjukkan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Angka IPG di suatu daerah semakin mendekati 100 maka artinya kesetaraan gender suatu wilayah tersebut lebih baik.⁴³

Tabel 2. 10
Metodologi penghitungan IPG

Dimensi	Indikator	IPG/GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki dan Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-raya Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan Pendapatan, Laki-laki & Perempuan	

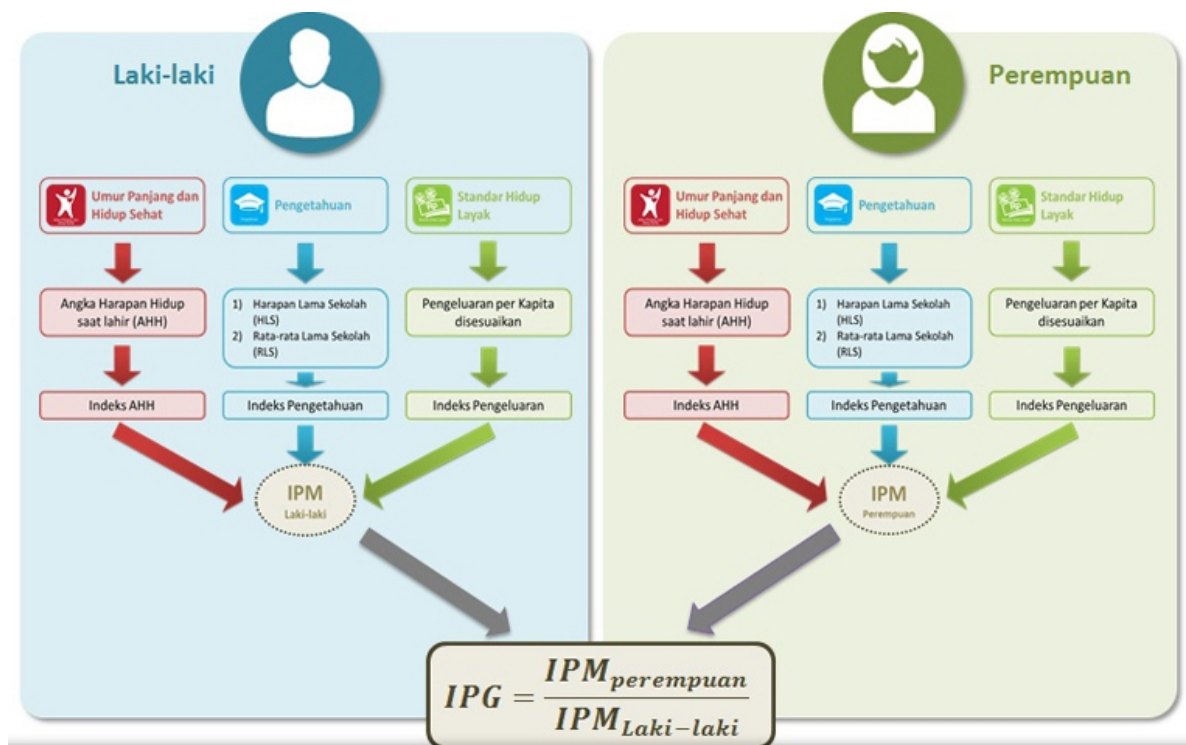
Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 21/2/2021

Tabel 2.11 diatas menunjukan ketiga dimensi dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPG. Dimensi tersebut diantaranya : umur panjang dan hidup sehat, hal ini terkait dengan kesehatan dan harapan hidup manusia; pengetahuan, yang merupakan dimensi yang terkait dengan pendidikan; dan kehidupan yang layak, yaitu ekonomi.

⁴³ Dina Nur Rahmawati, dkk. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak : Jakarta.

Gambar 2. 4

Metodologi Penghitungan IPG



Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 21/2/2021

IPG dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dibagi IPM laki-laki. IPM perempuan dan laki-laki tersebut merupakan hasil dari ketiga indikator yang dihitung dari masing masing gender.

Tabel 2. 11

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2019

No.	Tahun	IPG
1	2010	81, 29
2	2011	81, 33
3	2012	81, 42

4	2013	81, 76
5	2014	82, 27
6	2015	83, 10
7	2016	-
8	2017	84, 03
9	2018	84, 59
10	2019	84, 62

Sumber : Badan Pusat Statistik, diakses pada 8/2/2021

Data pada Tabel 2.12 diatas menggambarkan bahwa pencapaian IPG Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan secara konstan dilihat dari tahun 2010 hingga 2019. Pada tahun 2019, IPG Kabupaten Gunungkidul mencapai poin tertinggiya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,62. Sebaliknya IPG terendah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 81, 29. Hal ini menunjukan adanya perkembangan kesetaraan gender di Kabupaten Gunungkidul dapat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pencapai IPG tertinggi yaitu sebesar 94, 77 pada tahun 2019. Sehingga apabila dibandingkan dengan pencapaian IPG di D.I Yogyakarta, IPG di Kabupaten Gunungkidul masih tertinggal karena memiliki gap yang relatif jauh. Selain itu apabila disandingkan dengan IPG Nasional, IPG di Kabupaten Gunungkidul juga masih berada di bawah nilai IPG Nasional yaitu sebesar 91, 07 pada tahun 2019.